



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

Afiliasi:

¹Program Studi Akuntansi,
Universitas Muhammadiyah
Malang, Malang, Indonesia

***Correspondence:**

jati67@yahoo.com

DOI: 10.22219/jrak.v9i2.57

Sitasi:

Jati, A.W., Ulum & Utomo. (2019).
Tax Avoidance, Corporate
Governance dan Kinerja
Keuangan Perusahaan yang
Terdaftar dalam Jakarta Islamic
Index. *Jurnal Reviu Akuntansi dan
Keuangan*, 9(2), 214-225.

Proses Artikel

Diajukan:

17 Juli 2019

Direviu:

19 Juli 2019

Direvisi:

24 Juli 2019

Diterima:

01 Agustus 2019

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah
Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Tipe Artikel: Paper Penelitian

Tax Avoidance, Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index

Ahmad Waluya Jati^{1*}, Ihyaul Ulum¹, Cahyo Utomo¹

ABSTRACT

Tax avoidance is a tax savings actions that are still in the realm of tax law (lawful fashion). Financial performance and corporate governance are used as independent variables were estimated impact on tax avoidance as the dependent variable. Financial performance indicators are ROA, DAR, and DPR. Corporate governance is proxied with the percentage of attendance of the board of directors, board of commissioners and audit committee, the proportion of independent commissioners, and managerial ownership. Tax avoidance as a dependent variable is measured by effective tax rate (ETR). This research was conducted on companies incorporated in the Jakarta's Islamic Index 2016. The samples in this study used nonprobability sampling method with purposive sampling technique in order to get a sample size of 26 companies. Data in this study were analyzed with SEM-PLS. The results of this study indicate that the financial performance and corporate governance has an effect on tax avoidance.

KEYWORDS: *Corporate Governance, Effective Tax Rate, Financial Performance, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

215

Penghindaran pajak terjadi tidak lepas dari perencanaan manajemen perusahaan dan undang-undang yang masih memiliki celah untuk diselewengkan. Terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Perusahaan sebagai wajib pajak akan selalu berusaha menekan pajak mereka hingga seminim mungkin. Di sisi lain, penerimaan negara yang bersumber dari pajak sangat dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan adanya indikasi penghindaran pajak secara legal maupun ilegal yang dilakukan perusahaan atau wajib pajak.

Penelitian ini sangat penting berdasarkan tabel 1 di atas, indikasi penghindaran pajak masih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dilihat dari realisasi anggaran pada penghasilan dari pajak semakin menurun. Penghindaran pajak dilakukan baik secara legal menurut undang-undang maupun tidak. Namun pada penelitian ini hanya fokus pada penghindaran pajak secara legal karena kedepannya akan sangat merugikan pemerintah dalam mencapai kinerja yang baik pada realisasi anggaran pendapatan negara maupun daerah. Penghindaran pajak masih terjadi disebabkan masih adanya peraturan mengenai *self assesment system* yang memungkinkan pengusaha kena pajak untuk menghitung pajaknya sendiri.

Menurut (Zain, 2003), Upaya untuk meminimalisasi pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan umumnya disebut perencanaan pajak (*tax planning*) dan perencanaan pajak yang tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan disebut juga penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang merupakan suatu tindakan efisiensi biaya yang dilakukan secara sah menurut undang-undang dikarenakan undang-undang perpajakan yang masih belum sempurna. Strategi bagi perusahaan untuk menekan pajak hingga seminim mungkin disebut penghindaran pajak, sehingga resiko atas kegiatan tersebut dan terbukti melakukan penghindaran dengan memanfaatkan celah pada undang-undang akan dikenakan denda sekaligus reputasi perusahaan akan buruk (Winata, 2014).

Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah Kinerja keuangan dan *corporate governance* (Kurniasih dan Sari, 2013). *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator dari kinerja keuangan yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Cahyono *et al.*, 2016).

Selain ROA, Kinerja Keuangan perusahaan juga dapat diukur menggunakan Rasio *leverage*. *Leverage* menunjukkan sumber dana perusahaan yang berfokus pada hutang atau liabilitas. Sumber pendanaan dari hutang jangka panjang akan memunculkan beban bunga dan akan mengurangi dasar pengenaan pajak yaitu laba sebelum pajak. Penelitian terkait dengan *leverage* dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) yang menjelaskan bahwa *leverage* dapat digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Dividend Payout Ratio (DPR), juga merupakan indikator dari Kinerja Keuangan Perusahaan. *Dividend payout ratio* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Laba perusahaan menjadi pertimbangan penentuan dividen per lembar sehingga laba perusahaan menjadi tolak ukur dalam kinerja keuangan suatu perusahaan (Utomo *et al.*, 2016). Laba yang optimal menggambarkan kinerja perusahaan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan berusaha agar laba selalu optimal (Novianti, 2015).

Tabel 1.
Penerimaan
Dalam Negeri
dari
Perpajakan
Tahun 2012-
2016

Tahun	Penghasilan dari Pajak (Milyar Rupiah)			
	Realisasi	Anggaran	Selisih	(% selisih)
2012	980.518	1.016.237	35.719	3,51%
2013	1.077.307	1.148.365	71.058	6,19%
2014	1.146.866	1.246.107	99.241	7,96%
2015	1.240.419	1.489.256	248.837	16,71%
2016	1.539.166	1.546.665	7.498	0,48%

Corporate Governance (CG) meunjukkan kepengurusan dalam perusahaan. Kepengurusan tersebut menjelaskan tentang bagaimana tata kelola yang baik maupun buruk dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam tata kelola perusahaan. Dari tata kelola tersebut perusahaan berupaya untuk menekan pajaknya karena adanya tekanan dari berbagai pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali secara empiris pengaruh kinerja keuangan dan *coporate governance* terhadap penghindaran pajak studi empiris pada perusahaan yang terdaftar dalam *jakarta islamic index* pada tahun 2016. Pemilihan *jakarta islamic index* sebagai objek penelitian karena saham yang diterbitkan dengan kriteria syariah. Dengan berdirinya *jakarta's islamic index*, proses transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat tercipta, salah satunya dengan melaporkan rincian pajak perusahaan. Dengan rincian tersebut, dapat dilihat apakah perusahaan yang terdaftar dalam JII dan menerbitkan saham syariah terdapat indikasi untuk melakukan penghindaran pajak atau tidak

Bagi perusahaan besar, pemisahan fungsi atas pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan sudah diterapkan. Terlebih lagi, untuk perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), pemilik hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Artinya, jika perusahaan mengalami kebangkrutan akan besar kemungkinan modal yang telah disetor tersebut akan hilang, namun pemilik tidak akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan harta pribadi untuk menutup kerugian atas kebangkrutan perusahaan. Sehingga memunculkan banyak permasalahan dalam keagenan yaitu asimetri kepentingan pada pihak pemilik (principal) dan pengelola atau agen (Atmaja, 2008).

Pohan (2013) menyatakan bahwa upaya menghindari atau menekan pajak dapat dilakukan dengan cara legal karena terdapat celah pada peraturan perpajakan tersebut sehingga dimanfaatkan (*grey area*) oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Meski legal, penghindaran pajak diharapkan oleh pemerintah untuk tidak dilakukan karena akan tetap merugikan negara. Fenomena penghindaran pajak tidak lagi menjadi hal baru di Indonesia. Ada atau tidaknya indikasi suatu negara dimana perusahaan dalam negeri maupun swasta yang melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari statisik rasio pajak. Rasio pajak adalah tingkat penerimaan negara yang bersumber dari pajak dari total penerimaan negara. Tingginya rasio pajak suatu negara menunjukkan kinerja pemungutan pajak sangat baik (Putri dan Putra, 2017).

Kinerja perusahaan adalah suatu cara bagi perusahaan untuk menilai serta mengevaluasi kinerjanya dalam satu periode. IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan perusahaannya dilihat dari aspek laporan keuangan. Beberapa Rasio Keuangan menurut (Kasmir, 2008) antara lain dengan rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar. Profitabilitas adalah persentase kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba pada tingkat yang diterima. Kesehatan suatu perusahaan diukur berdasarkan besarnya profitabilitas perusahaan. *Leverage* menjelaskan tentang bagaimana

komposisi sumber pendanaan suatu perusahaan yang bersumber dari hutang dan bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Sedangkan Rasio pasar adalah sekumpulan rasio yang menghubungkan antara harga saham, jumlah pembayaran dividen, serta laba per lembar perusahaan. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja keuangan perusahaan pada masa lampau maupun yang akan datang.

Corporate Governance merupakan hubungan antara pihak *top management* dan *stakeholder* terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Irawan, 2012). *Corporate governance* adalah proses dan struktur untuk menajalan suatu perusahaan, dengan tujuan utama untuk mensejahterakan investor namun juga turut memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait *stakeholder* (Basri, 2009). Menurut Tunggal (2013), unsur-unsur *corporate governance* terdiri atas; Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Manajer dan Karyawan, Auditor Eksternal, Auditor Internal, dan *Stakeholder*. Dari sembilan unsur tersebut diambil lima unsur untuk dijadikan indikator *corporate governance* pada penelitian ini.

Perumusan Hipotesis

Return on assets (ROA) memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Tingkat profitabilitas akan mempengaruhi penghindaran pajak karena semakin perusahaan memiliki laba yang tinggi ditunjukkan dengan nilai rasio yang tinggi maka akan berdampak pada tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah sehingga dengan rendahnya tarif pajak efektif perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* adalah rasio yang mengukur total pendanaan dari hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio menunjukkan sumber pendanaan dari hutang semakin besar sehingga memunculkan beban bunga atau beban keuangan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pada laporan laba rugi, posisi beban keuangan terletak sebelum laba sebelum pajak. Sehingga, semakin besar beban keuangan juga akan menurunkan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang menentukan besar kecilnya beban pajak yaitu 25%. Sehingga perusahaan memanfaatkan kondisi tersebut untuk menurunkan dasar pengenaan pajaknya sehingga beban pajak yang dibarkan lebih kecil dari seharusnya.

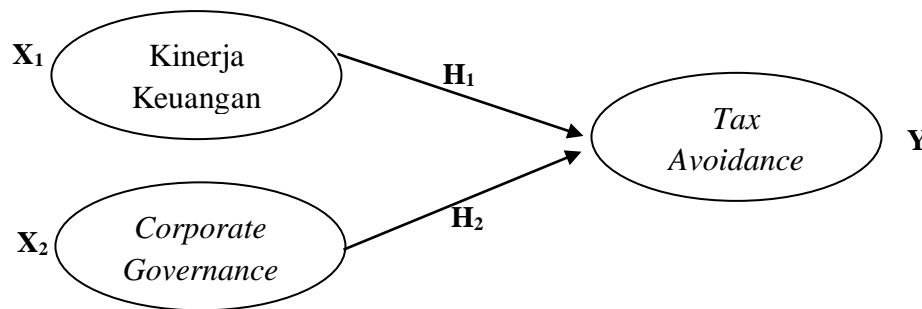
Rasio pasar diukur dengan *Dividend Payout Ratio* (DPR) dan menjadi salah satu indikator dari Kinerja Keuangan Perusahaan. *Dividend payout ratio* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Laba perusahaan menjadi pertimbangan penentuan dividen per lembar sehingga laba perusahaan menjadi tolak ukur dalam kinerja keuangan perusahaan (Utomo *et al.*, 2016). Sehingga hipotesis yang dapat diajukan:

H₁: *Kinerja Keuangan Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance*

Menurut Fadhillah (2014), Penerapan *corporate governance* dalam merumuskan kebijakan terkait perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besar kecilnya laba perusahaan. Untuk menilai kinerja, perusahaan berharap untuk memperoleh laba yang tinggi, namun dengan tingginya laba makan beban pajak juga akan ikut membesar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil. Dalam penelitian ini *corporate governance* diukur dengan menggunakan lima proksi yaitu dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, komisaris independen dan kepemilikan manajerial.

Dewan direksi menuntut untuk membuat kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Sehingga, tidak menutup kemungkinan dengan adanya dewan komisaris penghindaran pajak dapat dilakukan (Hadi dan Mangoting, 2015). Dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan (Sari *et al.*, 2016). Komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal. Sehingga dengan rendahnya jumlah komisaris independen pada jajaran dewan komisaris, akan mengakibatkan perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Berjalannya komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalkan kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki komite audit memungkinkan adanya pengendalian laporan keuangan yang efektif dan dapat mendukung adanya *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Saputra, 2017). Kepemilikan manajerial adalah saham yang beredar sebagian besar maupun kecil (non-pengendali) dimiliki oleh pihak manajerial atau *top management* (Kalbuana *et al.*, 2017). Sehingga peningkatan kepemilikan manajerial diharapkan dapat menurunkan level *tax avoidance*. Sehingga *corporate governance* yang diproksikan dengan lima indikator tersebut dapat mengakibatkan dilakukannya penghindaran pajak dan hipotesis yang dapat diajukan:

H₂: *Corporate Governance berpengaruh terhadap tax avoidance*



Gambar 1.
Kerangka
Pemikiran
Teoritis

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif (Ulum dan Juanda, 2016) yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa annual report perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta's Islamic Index* pada tahun 2016. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik penyempelan metode *purposive sampling* dengan kriteria harus dilaporkan dalam kurs rupiah dan data tidak *outlier*

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). ETR digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. ETR menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau manfaat pajak tangguhan. ETR digunakan karena dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan.

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan, dan *corporate governance*. Kinerja keuangan suatu perusahaan diukur dengan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, dan rasio pasar.

Sedangkan corporate governance diproksikan dengan lima indikator dari sembilan unsur corporate governance yaitu dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengujian hipotesis dengan WarpPLS terdapat dua tahapan yang harus dilakukan, yaitu pengujian *goodnes of fit* dan *outer model (structural model)* kemudian kedua syarat tersebut terpenuhi maka pengujian hipotesis dapat dilakukan.

Pengujian Goodness of Fit

Hasil pengujian fit indikator model ditunjukkan pada nilai APC, ARS, dan AVIF yang merupakan indikator fit model.

Model fit and quality indices

Average path coefficient (APC)=0.285, P=0.026

Average R-squared (ARS)=0.212, P=0.017

Average block VIF (AVIF)=1.066, acceptable if <= 5, ideally <=3.3

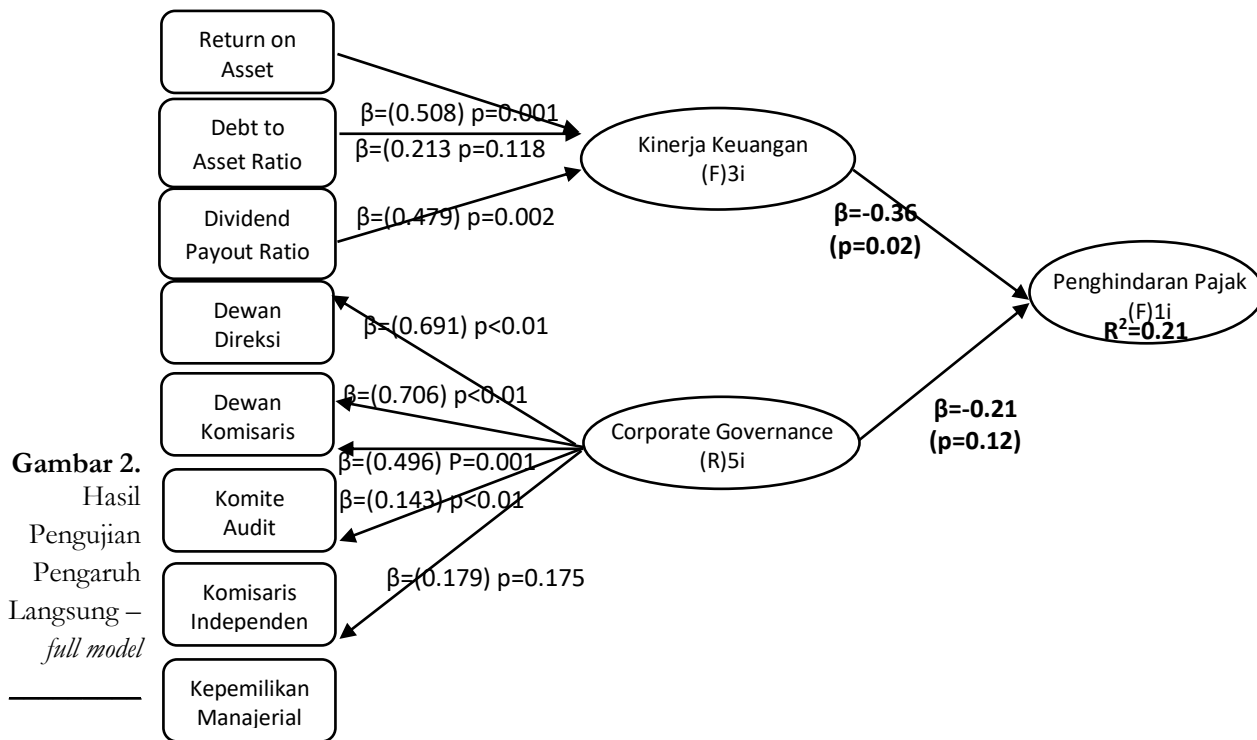
Pengujian Goodness of Fit dilakukan melalui model struktural yang dapat diketahui dari nilai Average path coefficient (APC), Average R-squared (ARS), dan Average block VIF (AVIF). Berdasarkan output model fit and quality indices diperoleh nilai Average path coefficient (APC) = 0,285, P=0,026; Average R-squared (ARS) = 0,212, P=0.017 dan Average block VIF (AVIF) = 1.066. Dengan demikian menggambarkan indikator-indikator model fit sudah terpenuhi berdasarkan keterpenuhan nilai P pada APS dan ARS < 0,05 dan nilai VIF < 3,3.

Pengujian model struktural (outer model)

Pengujian struktural dilakukan setelah model yang dibangun memenuhi goodness of fit. Evaluasi model struktural dilakukan dengan memerhatikan (1) nilai determinasi (R-squared), (2) relevansi prediktif (predictive relevance) ditunjukkan dengan nilai Q-squared lebih besar dari nol mengindikasi variabel laten dependen mempunyai relevansi prediktif pada variabel laten independen yang dipengaruhi dan (3) ukuran efek (f-squared effect sized) dihitung sebagai nilai absolute individual setiap variabel laten prediktor pada nilai R-squared variabel kriteria. Hasil pengujian model struktural ditunjukkan dari *Output Latent Variable Coefficient* pada table 2.

	Kinerja Keuangan	Corporate Governance	Penghindaran Pajak
<i>R-squared</i>			0,212
<i>Q-squared</i>			0,245
<i>Effect Size</i>	0,148	0,064	
<i>Kategori Effect Size</i>	Medium	Kecil	

Tabel 2.
Koefisien Variabel Laten



Hasil pengujian model struktural ditunjukkan dari nilai R-squared sebesar 0,212 dapat dijelaskan bahwa variabel penentu penghindaran pajak dari kinerja keuangan dan corporate governance mampu dijelaskan sebesar 21,2% dan selebihnya sebesar 78,8% kemungkinan penghindaran pajak dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Nilai Q-Squared yang sebesar 0,245 lebih besari dari 0 menjelaskan bahwa variabel independen yaitu kinerja keuangan dan corporate governance mempunyai relevansi prediktif pada variabel dependen penghindaran pajak yang dipengaruhi. Sementara nilai effect size masing-masing variabel independen menunjukkan kategori lemah yakni 0,148 untuk kinerja keuangan dan 0,064 untuk corporate governance. Kategori lemah berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Cohen yaitu 0,0 – 0,1 adalah efek kecil, 0,1 – 0,3 adalah efek medium/sedang, dan 0,3– 0,5 adalah efek besar (Gravetter dan Wallnau, 2013).

Model Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dan koefisien jalur langsung pada hipotesis 1 dan 2 yaitu antara variabel Kinerja Keuangan dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak. Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi koefisien jalur (*coefficient path*) dan nilai p untuk pengujian hipotesis pengaruh langsung.

Jalur	Koefisien	P-Value	R ²	Ket
Kinerja Keuangan (KK) – Penghindaran Pajak (PP)	-0,359	0,018	0,148	Sig 0,10
Corporate Governance (CG) – Penghindaran Pajak (PP)	-0,211	0,119	0,064	Sig 0,10

Tabel 3. Hasil Koefisien Jalur dan Nilai p

Berikut adalah masing-masing pembahasan untuk setiap pengujian :

221

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian pertama (H_1) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on assets*, *debt to asset ratio*, dan *dividend payout ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan nilai $p=0,018$ dan koefisien jalur sebesar $-0,359$ yang berarti memiliki hubungan negatif terhadap nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Kinerja Keuangan yang tinggi akan menurunkan nilai ETR. Nilai ETR semakin kecil mengindikasikan adanya penghindaran pajak. Sehingga, semakin baik kinerja keuangan pada perusahaan maka terdapat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Putri dan Putra, 2017).

Hasil Kinerja keuangan mempengaruhi penghindaran pajak sesuai dengan Teori Keagenan. Teori Keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen (Irfan, 2002). Agen akan melaksanakan dan mendukung apa yang diperintahkan oleh prinsipal apabila memiliki tujuan yang sama. Termasuk dalam penyusunan laporan keuangan yang mengharuskan pihak perusahaan (prinsipal) untuk membuat laporan yang baik demi kepentingan investor. Membuat laporan keuangan yang baik tidak lepas dari kinerja keuangan perusahaan yang baik pula. Salah satu yang mempengaruhi kinerja keuangan dengan meminimalkan beban pajak. Sehingga untuk mencapai hal tersebut, perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak secara legal untuk meningkatkan labanya.

Secara umum, kinerja keuangan yang tinggi akan berindikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan hal serupa dan juga didukung oleh penelitian sebelumnya. Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) secara simultan maupun parsial menunjukkan profitabilitas dan *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak. sedangkan secara parsial dari hasil penelitian menunjukkan indikator *return on asset* mempengaruhi penghindaran pajak. Dilihat dari nilai $p < 0.001$ kurang dari 0.10 yang berarti menunjukkan indikator tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari data statistik menunjukan bahwa rata-rata nilai ROA adalah 11,72% yang dinilai buruk jika dibandingkan dengan rata-rata industri. Rendahnya ROA tersebut berbanding terbalik dengan Rata-rata nilai ETR yaitu 20,09%. Nilai ROA sebesar 11,72% menunjukkan nilai yang rendah tetapi masih bisa mengangkat nilai ETR sebesar 20,09 sehingga arah menjadi berlawanan. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan Kinerja Keuangan berpengaruh negatif ,semakin tinggi ROA maka nilai ETR akan rendah, sebaliknya rendahnya nilai ROA akan meningkatkan nilai ETR. Namun ETR masih dibawah batas 25% dimana terdapat indikasi penghindaran pajak. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Damayanti dan Susanto (2015).

Indikator *debt to asset ratio* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai $p=0.118$ dengan signifikansi 0,10 yang berarti DAR mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 88,2% sehingga mendukung hipotesis penelitian. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) yang menyatakan *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak.

DAR pada hasil uji statistik menunjukkan rata-rata 25,44% yang berarti komposisi sumber dana dari Liabilitas adalah 25,44% sehingga ada indikasi memiliki beban keuangan. Liabilitas yang tinggi akan meningkatkan beban keuangan (*interest*) suatu perusahaan dilihat dari besar DAR yaitu 25,55% maka beban keuangan juga akan tinggi. Beban keuangan menjadi pengurang untuk mendapatkan laba sebelum pajak. laba sebelum pajak digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Sehingga, tingginya beban keuangan akan menurunkan laba sebelum pajak dan akan menurunkan dasar pengenaan pajak maka beban pajak juga akan menurun. Hasil ini membantah penelitian Sari (2014) dan Ngadiman dan Puspitasari (2014)

yang menyatakan bahwa *Leverage* yang diukur dengan *debt to asset ratio* tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Indikator *dividend payout ratio*, yang memiliki nilai $p < 0.001$ kurang dari 0.10 yang berarti indikator *dividend payout ratio* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa *dividend payout ratio* mempengaruhi penghindaran pajak. nilai Rata-rata DPR sebesar 34,62% masuk dalam kriteria tinggi antara 25-50% rata-rata industri. Tingginya nilai DAR sebesar 34,62% menunjukkan nilai relatif tinggi sehingga investor tertarik untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan. Pembayaran dividen yang rendah berindikasi bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak optimal sehingga perusahaan akan mencari cara agar kinerja keuangan perusahaan menjadi optimal dan meningkatkan pembayaran dividennya yang kemudian akan menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan (Novianti, 2015). Demi kepentingan investor tersebut perusahaan mencari cara agar mengoptimal kinerja keuangannya salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba. Tingginya nilai rata-rata DAR sebesar 34,62% tidak lepas dari laba perusahaan yang baik sehingga juga ikut meningkatkan dividen per lembar saham. Sehingga DAR sebesar 34,62% mengindikasikan adanya penurunan ETR menjadi 20,09%.

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian kedua (H_2) yakni *corporate governance* terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai $p = 0.119$ dengan signifikansi 0,10 dan koefisien sebesar -0.21. *Corporate Governance* yang semakin baik mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Cahyono *et al.*, 2016). Hasil ini didukung oleh tingkat kehadiran rapat dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit yang tinggi yakni 89,96%, 89,78%, dan 93,22%. Komisaris independen sebesar 42,93% menunjukkan jumlah komisaris independen yang berperan dalam perusahaan.

Hasil penelitian mendukung Teori Keagenan (*Agency Theory*) Teori Keagenan menjelaskan tentang adanya kerja sama antara prinsipal dan agen yang dilandasi oleh tujuan yang sama. Berdasarkan Teori Keagenan, *Corporate Governance* (Tata Kelola) perusahaan yang dilaksanakan oleh pihak (agen) yaitu pihak eksekutif perusahaan agar kinerja perusahaan secara menyeluruh baik dan optimal (Annisa dan Kurniasih, 2012). Bagi prinsipal (investor) menilai baik suatu perusahaan dari laba yang dihasilkan perusahaan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan laba adalah dengan menekan pajaknya. Pihak pengelola perusahaan (*Corporate Governance*) untuk menggapai tujuan tersebut melakukan berbagai cara yakni salah satunya melakukan penghindaran pajak.

Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda yakni indikator reflektif dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak dengan nilai $p < 0,001$. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014) yang menyatakan bahwa secara parsial dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak. Dewan direksi terbagi menjadi kepala-kepala *department* yang akan mempengaruhi secara langsung masing-masing *department* yang ada pada perusahaan. Menjadi tata kelola yang baik apabila direksi sudah melakukan tugasnya dengan optimal. Mengoptimal kinerja dinilai dari kinerja keuangan perusahaan yang baik. Dewan direksi akan mengelola perusahaan untuk mendapat laba yang tinggi salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak.

Dewan komisaris bertugas sebagai dewan yang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur. Dewan komisaris dinilai berdasarkan rata-rata kehadiran. Dewan

komisaris dapat dikatakan sebagai penggerak direksi dalam menjalankan perusahaan. Melakukan penghindaran pajak tidak lepas dari hasil perumusan bersama antara petinggi-petinggi perusahaan termasuk di dalamnya adalah dewan komisaris.

Tata kelola yang baik juga ikut mempengaruhi komite audit sebagai indikator. Hal ini karena Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling membantu demi kemajuan perusahaan. Dari data statistik menunjukkan bahwa rata-rata kehadiran komite audit dalam rapat adalah 93,22% yang menunjukkan angka sangat tinggi. Sehingga hadirnya komite audit juga menyebabkan pengambilan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan kinerja perusahaan. Komisaris independen turut andil dalam memperbaiki kinerja perusahaan terlebih pada pelaporan keuangan yang juga memerhatikan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Saputra *et al.*, 2016; Suprapti, 2017).

Kepemilikan manajerial pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya hubungan dengan penghindaran pajak. kepemilikan manajerial diukur dari seberapa besar saham yang dimiliki eksekutif perusahaan dan ada atau tidaknya eksekutif perusahaan memiliki saham perusahaan. Rata-rata kepemilikan saham manajerial adalah 0,04% sangat kecil di bawah 5%. Sehingga dapat diindikasikan manajerial tidak mengambil keuntungan sendiri guna mendapatkan dividen yang besar dari meningkatkan kinerja keuangan melalui penghindaran pajak. Hasil menunjukan berbeda dengan hipotesis yang menyatakan bahwa ada atau tidaknya saham pada perusahaan ikut mempengaruhi pembayaran dividen yang akan dibayarkan perusahaan dengan laba bersih perusahaan sebagai acuan dalam pembayaran dividen. Sehingga hipotesis menyatakan indikasi penekanan beban pajak atau melakukan penghindaran pajak dapat terjadi apabila jajaran eksekutif memiliki saham perusahaan sendiri (Winata, 2014).

SIMPULAN

Penelitian ini menguji dan memberi penjelasan yang lebih luas tentang penghindaran pajak. hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa konflik agensi tidak hanya semata konflik antara pemegang saham pengendali dengan manajer, tetapi juga terdapat konflik antara pemegang saham non-pengendali. Praktik penghindaran pajak dapat dipahami dari dimensi manfaat bagi pemilik maupun manajer. Penghindaran pajak terjadi ketika ada pemisahan dan pengendalian.

Hasil penelitian ini menunjukkan penghindaran pajak dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Semakin baik kinerja keuangan pada perusahaan maka terdapat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Bagi internal perusahaan kinerja keuangan yang baik menunjukan keberhasilan perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan. Penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh corporate governance. Semakin baik corporate governance atau tata kelola perusahaan maka ada penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, penghindaran pajak akan semakin meningkat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan dan tata kelola perusahaan sangat baik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, model penelitian yang diajukan relatif belum banyak dilakukan. Penelitian menggunakan model SEM sehingga dapat langsung melihat hasil secara keseluruhan. Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian juga masih sedikit yang mengembangkan. Kebanyak peneliti hanya menggunakan dua indikator dalam memroksikan variabelnya dan juga secara parsial. Indikator-indikator yang digunakan perlu dikembangkan melalui teori-teori yang lebih luas. Penelitian selanjutnya dapat melakukan

pengujian kembali terhadap variabel yang sudah ada, menambahkan maupun mengurangi variabel serta objek penelitian yang berbeda.

Pengujian kinerja keuangan hanya menggunakan tiga indikator dari lima indikator rasio keuangan yang dapat digunakan dan pengujian corporate governance hanya diproksikan dengan lima indikator reflektif dari sembilan indikator yang ada. Namun lebih baik jika menggunakan indeks karena hasil akan lebih akurat. Indeks (CGPI) yang digunakan harus sesuai dengan tahun objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A., dan L. Kurniasih. 2012. "Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance". *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol. 8, No. 2, hlm: 95-189.
- Atmaja, L. S. 2008. *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan* Yogyakarta: ANDI.
- Basri, F. H. 2009. *Catatan satu dekade krisis: transformasi, masalah struktural, dan harapan ekonomi Indonesia*: Esensi.
- Cahyono, D. D., R. Andini, dan K. Raharjo. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011–2013". *Journal Of Accounting*, Vol. 2, No. 2, hlm.
- Damayanti, F., dan T. Susanto. 2015. "Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance". *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2, hlm.
- Fadhilah, R. 2014. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, hlm.
- Gravetter, F. J., dan L. B. Wallnau. 2013. *Essentials of Statistics for the Behavioral Sciences*. Eight ed. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson.
- Hadi, J., dan Y. Mangoting. 2015. "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Agresivitas Pajak". *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 2, hlm.
- Irfan, A. 2002. "Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi". *Lintasan Ekonomi*, Vol. XIX, No. 2, hlm: 83-93.
- Kalbuana, N., T. Purwanti, dan N. H. Agustin. 2017. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, Dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia". *MAGISTRA*, Vol. 30, No. 100, hlm: 26.
- Kasmir. 2008. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniasih, T., dan M. M. R. Sari. 2013. "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance". *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 1, hlm: 58-66.
- Ngadiman, dan C. Puspitasari. 2014. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No. 3, hlm: 408-421.
- Novianti, N. 2015. "Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Koefisien Respon Laba". *ETIKONOMI*, Vol. 13, No. 2, hlm.
- Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia.

- Putri, V. R., dan B. I. Putra. 2017. "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Manajemen Daya Saing*, Vol. 19, No. 1, hlm: 1-11.
- Saputra, M. D. R. 2017. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 8, hlm.
- Saputra, M. F., D. Rifa, dan N. Rahmawati. 2016. "Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 19, No. 1, hlm: 1-12.
- Sari, E. P., L. Handajani, dan A. Saiful. 2016. "Corporate Governance dan Relevansi Nilai Dari Penghindaran Pajak: Bukti Empiris Dari Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, hlm: 33-48.
- Sari, G. M. 2014. "Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance". *Wahana Riset Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, hlm: 491-512.
- Suprpti, E. 2017. "Pengaruh Tekanan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, hlm: 1013-1022.
- Tunggal, H. S. 2013. *Internal Audit & Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo.
- Ulum, I., dan A. Juanda. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Utomo, W., R. Andini, dan K. Raharjo. 2016. "Pengaruh Leverage (DER), Price Book Value (PBV), Ukuran Perusahaan (Size), Return On Equity (ROE), Deviden Payout Ratio (DPR) dan Likuiditas (Cr) terhadap Price Earning Ratio (Per) pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2009–2014". *Journal Of Accounting*, Vol. 2, No. 2, hlm.
- Winata, F. 2014. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013". *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 1, hlm: 1-11.
- Zain, M. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.